

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi disuatu Negara yang diukur dari perbedaan PDB tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila jumlah total output produksi barang dan penyediaan jasa tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya, atau jumlah total alokasi output tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Menurut (Sukirno, 2005:443) dalam analisis makro,

tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai oleh suatu negara. Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertumbuhan PDB bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu: modal, tenaga kerja dan teknologi.

Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi saja sudah diakui tidak memberi jaminan untuk suatu proses pembangunan ekonomi yang stabil dan kontiniu, oleh karena itu, pembangunan dilakukan dan dikembangkan melalui suatu pendekatan integral dan menyeluruh. Pendekatan dan kebijaksanaan sistem ini telah diterapkan dan diaplikasikan di berbagai negara sehingga pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat berhasil secara maksimal. Sebagai contoh adalah Brasil. Negara besar ini merupakan negara relatif bermasalah dalam pembangunan berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan pembangunan ekonominya. Selama empat dasawarsa terakhir, Brasil mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang cepat yang dapat dilihat dari PDB. Namun demikian, selama periode yang sama, masalah kemiskinan, pengangguran serta distribusi pendapatan tetap dianggap sebagai masalah yang memerlukan

penanganan yang serius. Masalah di atas tetap terjadi walaupun Brasil merupakan salah satu negara industri baru dengan pembangunan sektor industri yang sangat pesat dan telah menyumbang 36 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan biasanya di indikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1. Perkembangan PDB di Indonesia dari tahun 1997-2010

Tahun	PDB	Persentase Perkembangan
1997	1.504.571,4	-
1998	1.329.987,6	-11,6%
1999	1.341.330,5	0,85%
2000	1.409.898,7	5,11%
2001	1.460.059,9	3,55%
2002	1.505.216,4	3,09%
2003	1.577.171,3	4,78%
2004	1.656.825,7	5,05%
2005	1.749.546,9	5,59%
2006	1.847.126,7	5,57%
2007	1.964.327,3	6,34%
2008	2.082.456,1	6,01%
2009	2.177.741,7	4,57%
2010	2.310.689,8	6,10%

Sumber: BPS 2010 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pada pertengahan tahun 1997, Indonesia seperti negara-negara lainnya di kawasan asia tenggara yang di hantam oleh krisis ekonomi yang sangat parah, sehingga pada tahun 1998 terjadi penurunan menjadi 1.318.999,90 milliar, perkembangan ekonomi seperti penurunan PDB sebesar dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 1999, dampak krisis ekonomi tersebut mulai bisa dikendalikan dan PDB ada tahun tersebut tumbuh sebesar 0,79 %. Tahun 2000, pertumbuhan ekonomi terus membaik

sehingga mencapai 4,92 %. Selama tahun 2001 sampai 2004, pertumbuhan ekonomi tumbuh rata-rata sebesar 4,39 %.

Krisis yang terjadi di Indonesia tidak saja telah memaksa rupiah terdepresiasi sangat tajam tetapi juga menimbulkan kontraksi ekonomi yang sangat dalam. Penurunan nilai tukar rupiah yang tajam disertai dengan terputusnya akses ke sumber dana luar negeri menyebabkan turunnya kegiatan produksi secara drastis dan berkurangnya kesempatan kerja sebagai akibat tingginya ketergantungan produsen domestik pada barang dan jasa impor. Pada saat yang sama, kenaikan laju inflasi yang tinggi dan penurunan penghasilan masyarakat telah mengakibatkan merosotnya daya beli sehingga kesejahteraan masyarakat menurun drastis dan kantong-kantong kemiskinan domestik semakin meluas.

Selama tahun 2000 perekonomian Indonesia menunjukkan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dengan pola pertumbuhan ekonomi yang semakin seimbang. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahun 2000 mencapai 4,92%, lebih tinggi dari prakiraan awal tahun Bank Indonesia sebesar 3,0%–4,0%. Sejumlah kemajuan juga dicapai dalam proses penyelesaian utang luar negeri pemerintah, telah selesainya program rekapitalisasi perbankan, serta telah dicapainya kesepakatan dalam penyelesaian masalah BLBI antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus membaik hingga mencapai 6,32%. Akselerasi pertumbuhan ekonomi, terutama berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi yang mencatat pertumbuhan tinggi. Sementara dari sisi penawaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri pengolahan,

sektor perdagangan, dan sektor pertanian. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan membaiknya indikator kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun menjadi 16,6% hingga pada tahun 2007. Selain meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan stabilnya inflasi, membaiknya indikator kemiskinan juga terkait dengan berbagai program sosial yang diluncurkan untuk membantu masyarakat miskin, termasuk bantuan yang terkait dengan bencana alam. Pada tahun 2008 pertumbuhan mencapai 6,01% dengan PDB sebesar 2.082.456,10 miliar. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,58 dengan PDB sebesar 2.177.741,70 miliar. Sedangkan pada tahun 2010 pertumbuhan PDB mengalami peningkatan yaitu 2.310.689,8 miliar rupiah pada triwulan akhir, dengan iklim ekonomi Indonesia yang semakin baik, PDB juga bergerak naik.

Pentingnya peran pemerintah dalam suatu sistem perekonomian telah banyak dibahas dalam teori ekonomi publik. Selama ini banyak diperdebatkan mengenai seberapa jauh peranan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan setiap orang berbeda dalam penilaian mengenai biaya keuntungan yang diperoleh dari program yang dibuat oleh pemerintah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat selama ini sangat bergantung kepada jasa yang disediakan oleh pemerintah. Banyak pihak yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas dan pengeluaran pemerintah. Beberapa hasil penelitian menunjukkan peranan yang positif dari modal publik terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan lebih besar dan yang lebih menentukan di dalam upaya pengelolaan perekonomian nasional.

Menurut (Jones, 2000:14) bahwa infrastruktur (*social overhead capital*) seperti jalan, jembatan dan pelabuhan walaupun tidak memberikan kontribusi secara langsung pada produksi *output*, tetapi infrastruktur memberikan peranan yang esensial dalam aktivitas ekonomi.

Berikut ini disajikan gambaran kondisi peran pemerintah menurut data BPS tahun 1997 s/d 2010.

Tabel 1.2. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah yang diukur dari besarnya belanja rutin dan belanja pembangunan Indonesia tahun 1997-2010

TAHUN	GE	PERKEMBANGAN
1997	10.108.700	-
1998	26.388.000	16,1%
1999	202.000.000	66,5%
2000	187.000.000	-7,42%
2001	260.500.000	39,3%
2002	224.000.000	-14,1%
2003	258.100.000	15,2%
2004	306.100.000	18,5%
2005	358.903.000	17,2%
2006	478.249.000	33,2%
2007	504.623.000	5,51%
2008	693.356.000	37,4%
2009	628.812.000	-9,3%
2010	697.406.000	10,9%

Sumber: BPS 2010 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2. diatas dijelaskan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah dari tahun 1997 s/d 2010 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16,1% dari Rp. 26.388.000 pada tahun 1998 menjadi Rp. 202.000.000 pada tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk investasi guna mencapai sasaran-sasaran program yang telah ditetapkan serta pengeluaran rutin yang digunakan untuk pelaksanaan

berbagai program dan kegiatan pemerintahan yang bersifat operasional dan peningkatan jangkauan mutu pelayanan terhadap masyarakat.

Secara teoritis masalah kemiskinan, pengangguran atau kesempatan kerja akan dapat diatasi dengan memaksimalkan investasi yang produktif di berbagai sektor ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam keberhasilan pembangunan ekonomi Malaysia. Malaysia merupakan salah satu dari beberapa negara dunia ketiga yang berhasil dan berkesinambungan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Malaysia relatif tinggi dengan tingkat inflasi yang rendah. Rata-rata pertumbuhan sektor riilnya hampir 5,5 persen per kapita antara tahun 1990 dan tahun 2000. Keberhasilan pembangunan ekonomi Malaysia ini tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan investasi yang cukup besar karena Malaysia menjadi salah satu pilihan utama bagi para investor internasional.

Investasi dalam bidang perkebunan misalnya telah menjadikan Malaysia sebagai salah satu produsen utama produk minyak kelapa sawit, karet, dan kayu tropis. Investasi ini dengan sendirinya telah membuka lapangan kerja yang luas kepada warganya bahkan kepada tenaga kerja dari berbagai negara. Selain itu, investasi pada sektor perminyakan dan pertambangan mulai tumbuh pesat sejak tahun 1980, sehingga menjadikan Malaysia sebagai salah satu pengeksport utama minyak dan gas di dunia. Disamping investasi dalam berbagai sektor di atas, investasi dalam dan luar negeri banyak tercurah ke sektor manufaktur yaitu investasi asing yang terbesar berasal dari Jepang dan Amerika Serikat. Keberhasilan Malaysia dalam menarik investasi terutama didukung oleh tenaga terdidik yang terampil yang cukup banyak dan stabilitas politiknya yang cukup

mantap. Tingkat tabungan domestik Malaysia juga relatif tinggi sehingga mampu menyediakan dana investasi.

Menurut Tambunan (2001:160). Keberhasilan pelaksanaan investasi seperti ini diuraikan di atas seharusnya dapat diaplikasikan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Salah satu permasalahan tersebut adalah jumlah angkatan kerja yang terus meningkat yang tidak sebanding dengan pertumbuhan sektor-sektor pembangunan. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan di posisi kedua adalah sektor industri terutama industri pengolahan. Namun dalam perkembangan pembangunan selanjutnya, Indonesia mengalami transformasi dari sektor pertanian menuju sektor industri. Kondisi ini menyebabkan tingginya permintaan angkatan kerja terhadap sektor industri, khususnya perkotaan. Pendapatan yang lebih terjamin dan kehidupan yang lebih modern menyebabkan permintaan angkatan kerja terhadap sektor industri semakin meningkat setiap tahun, bahkan telah menjadi fenomena tersendiri melalui arus urbanisasi yang terus berlangsung

Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, khususnya sektor industri yang diharapkan akan mampu mengurangi peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Peran sektor industri sangat diharapkan karena sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memberikan kesempatan kerja yang lebih luas dibandingkan dengan sektor

pertanian. Hal ini berarti bahwa investasi yang besar dalam sektor industri harus dilakukan sehingga dapat memberi kesempatan kerja yang luas seperti diharapkan.

Memburuknya perekonomian Indonesia sejak krisis pada pertengahan 1997 membuat kondisi ketenagakerjaan Indonesia ikut memburuk. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak pernah mencapai 7-8 persen. Padahal, masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 400 ribu orang. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3-4 persen, hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja, sementara pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta pertahun (Depnakertrans, 2004). Berarti ada sejumlah 0,9 juta angkatan kerja yang tidak tertampung atau menganggur setiap tahun.

Krisis ekonomi telah menyebabkan dampak yang sangat serius terhadap dunia industri. Nilai tukar rupiah yang terus melemah menyebabkan biaya operasi industri, khususnya dalam penyediaan bahan baku menjadi tinggi. Demikian juga inflasi yang diakibatkan oleh krisis menyebabkan terjadinya peningkatan harga-harga, termasuk bahan bakar minyak. Inflasi juga menyebabkan berbagai tuntutan kenaikan upah oleh kelompok buruh. Kondisi ini menyebabkan biaya produksi sektor industri melambung tinggi, sehingga produk tersebut tidak mampu bersaing dengan produk lain, khususnya produk impor. Hal ini menyebabkan sebagian besar industri melakukan PHK, dan bahkan sudah banyak yang tidak beroperasi lagi. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah pengangguran.

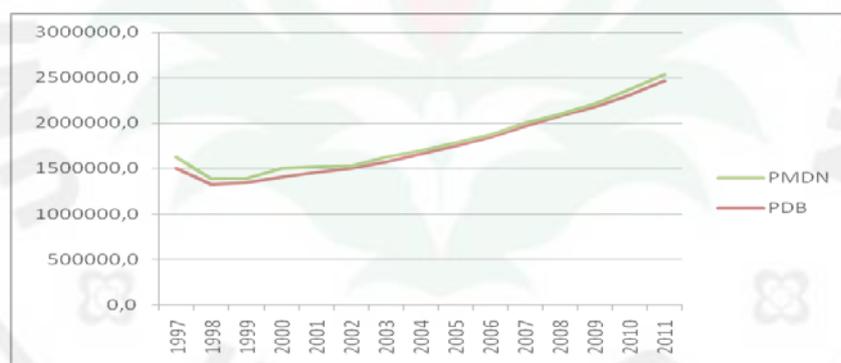
Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja ini, maka salah satu tujuan pembangunan nasional adalah perluasan kesempatan kerja yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan investasi. Tujuan ini menjadi penting karena pertumbuhan penduduk yang tinggi sudah pasti diikuti pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi pula. Di pihak lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu diikuti oleh pertumbuhan atau perluasan kesempatan kerja. Hasil penelitian *Internasional Labour Organization* (ILO) di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti oleh perluasan kesempatan kerja, malah pengangguran yang semakin meningkat dan taraf hidup yang semakin rendah.

Menurut Silalahi (2004:36), untuk menanggulangi masalah penganggur dan setengah penganggur, efek netto dari hasil pembangunan yang diperkirakan akan semakin baik di masa mendatang perlu didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain terciptanya kesempatan kerja produktif. Penciptaan kesempatan kerja produktif dapat dilakukan dalam bentuk investasi, sehingga lebih banyak memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja. Jaminan keamanan dan biaya investasi yang produktif juga akan meningkatkan investasi di dalam negeri.

Keberhasilan pertumbuhan PDB, tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi. Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan *output* secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan *input*, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat (Yasin, 2003: 7)

Dalam kaitan ini perlu dipisahkan jenis investasi yang dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah, mengingat faktor yang menentukan lokasi kedua jenis investasi tersebut tidak selalu sama. Namun demikian, kedua jenis investasi baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta pada akhirnya akan dapat menambah kesempatan kerja dan memberi sumbangan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan sebagainya.

Berdasarkan data BPS, PDB Indonesia tahun 1997-2010 menunjukkan peningkatan setiap tahun. Hubungan antara PDB, investasi khususnya PMDN dan tenaga kerja diperlihatkan pada Gambar 1.1 dan 1.2.

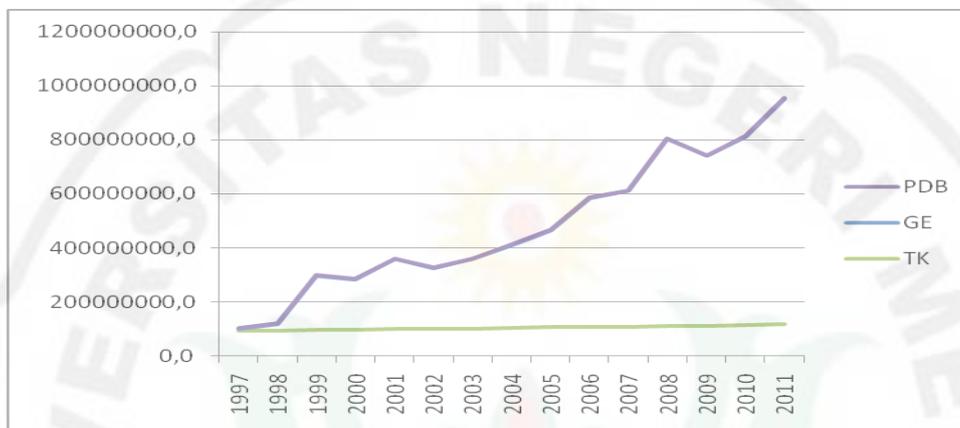


Sumber: BPS 2010 (Diolah)

Gambar 1.1. PDB, Investasi PMDN di Indonesia (Milyar Rp)

Pada grafik 1.1 dan 1.2 dapat diketahui bahwa besaran PDB di Indonesia terus menerus meningkat dari tahun ketahun jumlah PDB terendah berada pada tahun 1998 yang berjumlah 1.329.987,6 milyar. hal ini dikarenakan krisis ekonomi yang sangat parah. Pada tahun 1999, dampak krisis ekonomi tersebut mulai bisa dikendalikan dan PDB ada tahun tersebut tumbuh sebesar 0,79 %. Tahun 2000, pertumbuhan ekonomi terus membaik sehingga mencapai 4,92 %. Selama tahun 2001 sampai 2004, pertumbuhan ekonomi tumbuh rata-rata sebesar 4,39 %. dengan iklim ekonomi Indonesia yang semakin baik, PDB juga bergerak

naik. Pada tahun 2010, Pertumbuhan PDB mengalami kenaikan. Sama halnya dengan Investasi PMDN, Pengeluaran Pemerintah dan tenaga kerja.



Sumber: BPS 2010 (Diolah)

Gambar 1.2. PDB, Pengeluaran Pemerintah (GE), Tenaga Kerja (TK) (Milyar Rp)

Berdasarkan permasalahan tersebut hal ini dikira penting untuk dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian adalah: bagaimana pengaruh investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, jumlah tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk menganalisis pengaruh investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, jumlah tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Sebagai informasi dan bahan masukan bagi pemerintah, pelaksanaan investasi sehingga terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas.
2. Sebagai informasi ilmiah dan wawasan ilmu pengetahuan tentang pengaruh investasi, jumlah tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

